

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM  
BENYAMIN BIANG KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.SUS-  
HKI/CIPTA/2018/PN NIAGA JKT.PST**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**DIANDRA NOVY WINALDA**

**C100170073**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM BENYAMIN  
BIANG KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN  
NIAGA JKT.PST**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

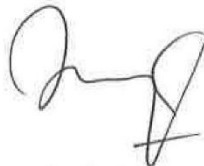
**DIANDRA NOVY WINALDA**

**C100170073**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen**

**Pembimbing**



**(Inayah, S.H, M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM BENYAMIN  
BIANG KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN  
NIAGA JKT.PST**



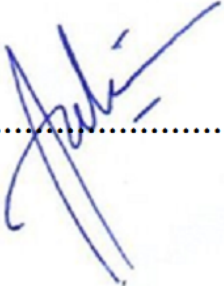
**OLEH**

**DIANDRA NOVY WINALDA**

**C100170073**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis 8 April 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Inayah, S.H., M.H  
(Ketua Dewan Penguji) 
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. Andria Luhur Prakosa, S.H., M.Kn  
(Anggota II Dewan Penguji) 

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Maret 2021

Penulis,



**DIANDRA NOVY WINALDA**

**C100170073**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM BENYAMIN  
BIANG KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN  
NIAGA JKT.PST**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang berhak disebut sebagai pemegang sah hak cipta dalam film Benyamin Biang Kerok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mengetahui bagaimanakah sebenarnya upaya perlindungan hukum terhadap permasalahan suatu ciptaan di bidang sinematografi film dan mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst Sudah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. Metode penelitian yuridis normatif karena pada dasarnya penulis akan mengkaji masalah-masalah internal hukum positif yang berkaitan hak cipta film. Bahan penelitian menggunakan putusan nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemegang hak cipta bukan Penggugat I melainkan Tergugat I dan II, perlindungan hukum ada pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan menggunakan langkah preventif dan represif, dan majelis hakim menolak gugatan penggugat dan hanya mengakui hak moral yang ada pada diri penggugat sebagai penulis cerita film.

**Kata Kunci:** hak cipta, film, benyamin biang kerok

**Abstract**

This study aims to explain who actually has the right to be called the legal holder of copyright in the film Benyamin Biang Kerok according to Law Number 28 of 2014, an indicator of how the actual legal protection against the problem of a creation in the field of film cinematography and see whether the judge's consideration in the decision Number 53 / PDT.SUS-HKI / CIPTA / 2018 / PN Niaga Jkt.Pst Already In Accordance With Applicable Regulations. Normative juridical research method because in the author's answer will examine the internal problems of positive law related to film copyright. The research material used decision number 53 / PDT.SUS-HKI / CIPTA / 2018 / PN Niaga Jkt.Pst. The results of the research are in the form of answers to the formulation of the problem that the copyright holder is not the Plaintiff, but Defendants I and II, legal protection is in article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 and uses preventive and repressive measures, and the panel of judges refuses the plaintiff's lawsuit and is only willing to acknowledge the moral rights that the plaintiff has as the writer of the film story.

**Keywords:** copyright, film, benyamin biang kerok

## **1. PENDAHULUAN**

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat di dalam ilmu hukum

dan disebut Hukum HKI. Hak Kekayaan Intelektual ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral (Damian, 2003).

Namun beberapa waktu lalu, perfilman Indonesia diwarnai oleh kisruh masalah hak cipta film Benyamin Biang Kerok versi terbaru yang tayang pada 1 Maret 2018 lalu. Syamsul Fuad, penulis naskah asli film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung, menuding dua rumah dan dua produser film Benyamin Biang Kerok versi baru telah melanggar hak cipta. Penggugat lewat kuasa hukumnya memasukan gugatan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Tergugat I dan II (Falcon Pictures dan Max Pictures). Didalam gugatannya, Syamsul Fuad menuduh dua rumah produksi tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta atas cerita “Benyamin Biang Kerok” dan “Biang Kerok Beruntung” yang ia tulis pada tahun 1972.

Hasil putusan sidang nomor 53/Pdt.SusHKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst dari gugatan penggugat tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan penggugat bukanlah sebagai pemegang hak ekonomi film tersebut melainkan hanya sebagai pemegang hak moral. Oleh karena itu penulis bermaksud agar kajian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam menganalisis siapa yang berhak disebut sebagai pemegang hak cipta dalam sebuah produksi film. Oleh karena itu untuk penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM BENYAMIN BIANG KEROK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Analisis Putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst).**

Dari latar belakang yang penulis jabarkan maka penulis Menyusun tiga buah rumusan masalah. Rumusan masalah pertama Siapakah yang Berhak Disebut Sebagai Pemegang Sah Hak Cipta atas Film Benyamin Biang Kerok? kedua Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Ciptaan di Bidang Sinematografi film? ketiga adalah Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst Sudah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku?

## **2. METODE**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan metode doktrinal yang bersifat yuridis normatif karena pada dasarnya penulis akan mengkaji masalah-masalah internal hukum positif yang berkaitan hak cipta film.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pihak yang Berhak Disebut Sebagai Pemegang Sah Hak Cipta atas Film Benyamin Biang Kerok**

Dalam penelitian penulis menggunakan putusan nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN NIAGA JKT.PST sebagai sumber data yang mana disebutkan didalam putusan tersebut penggugat yaitu Syamsuf Fuad adalah sebagai penulis cerita, penulis skenario, asisten sutradara dan sutradara film layar lebar dengan pemeran utama yang diperankan oleh Alm. H. Benyamin Suaeb dengan judul film “Benyamin Biang Kerok ”dan “Biang Kerok Beruntung” yang filmnya rilis pertama dan laris pada tahun 1972 dan 1973, yang kemudian film yang sama di remake atau dibuat ulang oleh rumah produksi Falcon Pictures pada tahun 2018, dan yang menjadi permasalahan adalah Penggugat sebagai penulis naskah skenario asli film yang terdahulu merasa tidak diberitahu bahwa film tersebut akan diproduksi ulang dengan mengangkat judul dan cerita yang sama dengan film terdahulu yang ia tulis.

Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang yang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta (Riswandi dan Syamsudin, 2004), dalam sistem itu, perlindungan hak moral disejajarkan dengan hak ekonomi. Selain hak memanfaatkan karya cipta, masyarakat juga berkewajiban mencantumkan dan menjaga citra pencipta. Berbeda dengan negara-negara *Common Law*. Negara-negara tersebut meletakkan perlindungan hak moral dibawah hak ekonomi, menurut sistem kontinental pencipta dari film adalah orang yang membiayai film tersebut, dan konsep tersebut sama dengan pasal 36 UU Hak Cipta di peraturan perundang-undangan tentang hak cipta di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan dalam Pasal 36 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa “*Kecuali diperjanjikan lain,*

*pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.”. Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Maka jika melihat ketentuan di atas, apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, dalam hal produksi film, yang menjadi pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan (film). Tetapi jika diperjanjikan, maka dimungkinkan bagi pihak pemberi kerja / yang memberikan pesanan untuk menjadi pemegang hak cipta (dalam hal ini rumah produksi). Selain itu, dalam pasal 37 Undang – Undang Hak Cipta menyebutkan “Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.”.*

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta disini Penggugat yang adalah sebagai penulis skenario film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung bisa di sebutkan bukan merupakan pemegang sah hak cipta kedua film tersebut dikarenakan Penggugat hanya sebagai penulis cerita atau skenario film tersebut yang mana pada saat itu Penggugat bisa dikatakan ada hubungan kerja dengan pihak swasta yaitu PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film yang memproduksi dan membiayai produksi film tersebut dan sudah membayar hasil kerja Penggugat sebagai penulis skenario atas film yang mereka produksi tersebut, maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa pemegang hak cipta atas film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung bukanlah Syamsul Fuad atau Penggugat I yang pada saat itu bekerja dan dibayar oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film yang tugasnya adalah sebagai penulis skenario atas film yang di produksi oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film, dan pemegang hak cipta pertama kali adalah PT Harapan Film Corp sebagai pihak produser film tersebut.

Dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan dengan tegas bahwa Hak Cipta dapat beralih karena suatu perjanjian atau karena suatu pewarisan. Beralihnya hak cipta terjadi dari pemegang hak cipta yang sah kepada pihak yang



baru, terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pemegang hak cipta. Dalam hal film “BENYAMIN BIAN KEROK”, pemegang hak ciptanya yang pertama kali adalah pihak produser, yaitu: PT. Harapan Film Corp., yang kemudian dialihkan kepada Tergugat III yaitu ada PT Bandung Permai Film yang kemudian dibeli hak ciptanya oleh Tergugat I Falcon Pictures sejak tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh (21-10-2010) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pengalihan Hak Atas Film No. 006/LKFFLC/X/2010 antara Tergugat I dengan PT Layarciptanya Karyamas Film

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Ciptaan di Bidang Sinematografi film**

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Sifat dari perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan pemerintah. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum sebagai hukum Bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Akbar, 2016). Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa (Hariyani, 2010).

Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan karya sinematografi disebutkan pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana disitu disebutkan bahwa karya sinematografi adalah salah satu karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan karya sinematografi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Sanksi bagi

yang melakukan pelanggaran terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf h yang akan dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Akbar, 2016)”. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa juga telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, dan selain itu cara yang dapat ditempuh adalah dengan 2 (dua) cara. Pertama, dengan cara preventif yang perlindungannya diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Kedua, dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya Sinematografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

### **3.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst**

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai sengketa hak cipta film Benyamin Biang Kerok. Dalam hukum acara perdata berlaku asas bahwa setiap putusan harus disertai alasan. Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (Harahap, 2011).

Putusan Hakim dalam perkara nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst dari hasil kesimpulan pembuktian oleh Majelis hakim menerangkan bahwa dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi, *“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”*, sedangkan Pengertian Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 adalah *“Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”*

Menyatakan bahwa Falcon Pictures dan Max Pictures adalah merupakan pemegang Hak Ekonomi sehingga berdasarkan bukti surat T-I, T-II, T-III/PR I & PR II – 5, PR II - 6, PR II - 7, PR II - 8 yaitu adanya pelimpahan hak, Akta Penyimpanan kepada pihak lain yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III adalah berdasar karena Tergugat I merupakan Pemegang Hak Ekonomi terhadap kedua film tersebut sebagaimana telah dicatatkan pada Menteri Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan berdasarkan bukti surat T-I, T-II, T-III/PR I & PR II – 12 A, 12 B masing-masing diumumkan tertanggal 1 Juni 1973 dan 20 April 1972, Nomor dan tanggal Pendaftaran masing-masing: EC00201800553, tanggal 17 Januari 2018 terhadap judul ciptaan Benyamin Biang Kerok dan EC00201800547, tanggal 17 Januari 2018 terhadap Judul Ciptaan Biang Kerok Beruntung yang menyebutkan pemegang hak ciptanya berada pada Tergugat I yaitu PT FALCON (Falcon Pictures).

Dengan diakuinya penulis kedua film tersebut namun pemegang hak ciptanya berada pada PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film sebagai pihak yang memproduksi dan membiayai kedua film tersebut maka Penggugat adalah pencipta yang merupakan pemegang hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 butir a Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 dimana Para Tergugat tetap mencantumkan namanya dalam tanyangan kedua film tersebut sebagai penulis cerita kedua film tersebut, sedangkan hak ekonominya berada ditangan oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film sebagai pihak yang membiayai dan memproduksi film – film tersebut.

Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim hanya mengakui hak moral yang ada pada diri Penggugat sebagai penulis cerita film. Dengan kata lain akta jual beli atau juga pengalihan hak cipta milik Tergugat dinyatakan sah berdasarkan hukum yang berlaku yang menyatakan Tergugat I lah sebagai pemegang hak cipta dari kedua film tersebut, dan dengan alasan-alasan diatas penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst berdasar dengan pertimbangan-pertimbangannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Yang berhak disebut sebagai pemegang sah hak cipta atas film benyamin biang kerok adalah Falcon Pictures dan Max Pictures. Penelitian menunjukan bahwa Syamsul Fuad bukanlah pemegang hak cipta film Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung, pemegang sah hak cipta film Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung adalah Falcon Pictures dan Max Pictures, karena telah ada perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak tertanggal 21 Oktober Tahun 2010 yang dibuat antara Tergugat I yaitu Falcon Pictures dan juga Tergugat III PT Layarcipta Karyamas Film yang sebelumnya telah menerima hak cipta kedua film tersebut dari Harapan Film Corp berdasarkan Surat Pelimpahan Hak tertanggal 20 November 2001, Penggugat Syamsul Fuad dalam pembuatan kedua film tersebut adalah sebagai penulis cerita kedua film tersebut yang dipekerjakan oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film dan berdasarkan Pasal 36 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa "*Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.*". Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Maka jika melihat ketentuan di atas, apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, dalam hal produksi film, yang menjadi pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan (film). Tetapi jika diperjanjikan, maka dimungkinkan bagi pihak pemberi kerja /

yang memberikan pesanan untuk menjadi pemegang hak cipta (dalam hal ini rumah produksi).

Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan karya sinematografi disebutkan pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana disitu disebutkan bahwa karya sinematografi adalah salah satu karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, dan selain itu cara yang dapat ditempuh adalah dengan 2 (dua) cara. Pertama, dengan cara preventif yang perlingkungannya diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Kedua, dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya Sinematografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pertimbangan Majelis hakim saat memutus di Putusan Pengadilan Niaga Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst Hakim menolak gugatan penggugat karena pemegang sah hak cipta film *Biang Kerok* dan *Biang Kerok Beruntung* adalah Falcon Pictures dan Max Pictures, karena telah ada perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak tertanggal 21 Oktober Tahun 2010 yang dibuat antara Tergugat I yaitu Falcon Pictures dan juga Tergugat III PT Layarcipta Karyamas Film yang sebelumnya telah menerima hak cipta kedua film tersebut dari PT Harapan Film Corp berdasarkan Surat Pelimpahan Hak tertanggal 20 November 2001. Sehingga Syamsul Fuad tidak berhak atas kepemilikan hak cipta karena dia merupakan penulis dari kedua film tersebut yang pada saat itu di pekerjakan oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film sebagai pihak yang memproduksi dan membiayai kedua film tersebut yang berdasarkan Pasal 36 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa "*Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.*". maka Penggugat adalah pencipta cerita dan bukan pemegang hak cipta.

Pertimbangan hakim tersebut berlandaskan pada pengertian Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 adalah “*Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah*”. Dan dalam Pasal 36 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa “*Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.*”. Dalam kasus ini Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Penulis cerita, Penulis skenario, asisten sutradara dan sutradara yang pada saat itu bekerja atau memiliki hubungan kerja dan dibayar oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film yang tugasnya adalah sebagai penulis skenario atas film yang di produksi oleh PT Harapan Film Corp dan PT Bandung Permai Film, dan pemegang hak cipta dan memiliki hak ekonomi dari kedua film tersebut adalah PT Harapan Film Corp sebagai pihak produser film tersebut.

Majelis Hakim hanya mengakui hak moral yang ada pada diri Penggugat sebagai penulis cerita film. Dengan kata lain akta jual beli atau juga pengalihan hak cipta milik Tergugat dinyatakan sah berdasarkan hukum yang berlaku yang menyatakan Tergugat I lah sebagai pemegang hak cipta dari kedua film tersebut, dan dengan alasan-alasan diatas penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 53/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN Niaga Jkt.Pst berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **4.2 Saran**

Bagi pencipta sebuah karya disarankan agar mendaftarkan ciptaannya pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dirjen Kekayaan Intelektual, kerana pendaftaran tersebut berguna untuk pihak yang memiliki hak atas ciptaan tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila timbul sengketa terkait ciptaannya. Karena suatu karya atau ciptaan memiliki unsur hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral adalah hak atas perlindungan ciptaannya terhadap originalitas ciptaannya agar tidak diubah dan dirusak oleh orang lain serta pengakuan sebagai

pencipta atas ciptaannya dan hak ekonomi adalah hak atas perlindungan nilai ekonomi atas ciptaannya.

Bagi akademisi diharapkan bagi akademisi yang memahami konsep mengenai hukum hak cipta terutama terkait peraturan sinematografi membantu dalam menyusun dan mengembangkan konsep yang jelas demi memberikan saran kepada pemerintah agar tidak ada kesalah pahaman dalam masyarakat di masa depan.

Bagi pemerintah mengingat banyaknya kompleksitas dalam pembuatan karya film perlu adanya pembaharuan khusus untuk mewadahi masalah-masalah yang timbul dari pada saat film tersebut dibuat sampai film tersebut di publikasikan kepada masyarakat atau di tayangkan di bioskop, khususnya terkait pengertian pencipta yang masih luas artinya dalam hal ini belum spesifik sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat terkait siapa pencipta dan pemegang hak cipta dalam bidang sinematografi. Permasalahan tentang siapa yang disebut pencipta dan pemegang hak cipta dalam ciptaan suatu film dan tugas serta fungsi setiap kru dalam film dari produser, sutradara, penulis cerita, pemeran film dan lain sebagainya harus diperjelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami, Chazawi. (2007). *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang : Bayumedia Publishing
- Akbar, Fajar Alamsyah. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*
- Anisti. (2017). Komunikasi Media Film Wonderful Life (Pengalaman Sineas Tentang Menentukan Tema Film)” *Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 1, Maret, 2017*
- Damian, Eddy. (2003). *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Dewita, Alvieta., Permata., Rika Ratna dan Muchtar, Helita Novianty. (2020) “Pelindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial,” *Volume 5, No. 1, 2020*

- Diantha, I Made Pesek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, (2008), *Metode Penelitian Hukum*. (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Harahap, M. Yahya, (2005). *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Margono, Suyud. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris, Sitanggang, Sally. (2011). *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta :Erlangga,
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Stefano, Daniel Andre., Saptono, Hendro dan Mahmudah, Siti. (2016) "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan FilmStreaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," , *Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta